

RELASI MASYARAKAT KAMPUS: SOSIAL ATAU INTELEKTUAL

Oleh: Nufiar

Dosen DPK IAIN Ar-Raniry pada STIS Al-Hilal Sigli

Abstrak: In science tradition, usually, the relation of latent instructing in profetik-akademic doesn't emerging off hand. He (she) must be woke up when needed given by opportunity which berkelindan as presentation of domination of self and increasing of quality. Hence, campus institute which is one of icon is place of accomodating various place meeting of antar-pikiran, and not meeting of antar-pribadi. Because, patron such a science, part of practice of idea discourse to be being animated in area of which "holy", even also as infinite intellectual reaction.

Kata Kunci: Tradisi Keilmuan, Kebebasan Akademik, dan Kualitas

Barat kata pepatah: "perputaran roda waktu, terkadang entah ini dan itu pasti mengalami kemacetan, atau kalau tidak dikata selalu berubah-ubah". Namun dalam tulisan ini, kemacetan atau juga perubahan tersebut tidak dilihat dalam bentuk metafor yang abstrak, melainkan hendak diteruskan dalam skema-skema interpretasi dan tindakan yang relevan dengan situasi kampus saat ini. Karenanya, pekerjaan ini tidak begitu mudah juga tidak begitu sulit atau istilah yang lazim didengar: "gampang-gampang sulit" untuk dilakukan. Sehingga pekerjaan ini, kendati selalu berubah, namun yang terpenting perubahan itu tidak dibentuk dalam sebuah ideologi yang me-nunggal. Dia mesti berdasarkan kesempatan yang menjanjikan, kesempatan pemahaman, dan kesempatan sikap "baru" yang hendak dijalankan (tuntutan) dalam dinamika pengetahuan-keilmuan dunia akademik.

Selama ini, dalam dunia akademik, konsep-konsep teoretis mengenai "identitas"—yang dalam hal ini penulis arahkan kepada institusi formal IAIN Ar-Raniry, di mana riwayatnya telah tumbuh sejak tahun 1963, dan merupakan institusi formal ketiga (3) setelah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta [1951] dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[1957], adalah sebuah fenomena.¹ Identitas ini semakin mendapat sorotan, terutama yang memfokus pada dimensi biner dikotomisasi *self-other* di tingkat Perguruan Tinggi, khususnya IAIN Ar-Raniry. Jika demikian, menarik dicermati pandangan H.A. Mukti Ali yaitu "Kita membutuhkan pembaruan dan kearifan fundamental untuk meresponnya dengan sikap yang sesuai dan tepat. Hal ini membutuhkan kemauan bertindak, kehendak politik yang sebenarnya, namun tetap bersumber dari kearifan dan ketajaman yang dilahirkan dari sintesa pemikiran masa lalu dengan masa yang akan datang"² Karenanya, masalah identitas menyangkut masalah penting.³ Pertanyaan tentang "siapa kita", "siapa yang bukan kita", dan kemudian "cara pandang kita", cenderung menempatkan pada oposisi biner dalam relasi-relasi kekuasaan. Dengan demikian, adalah hal yang mesti dicermati kembali mengenai persoalan identitas—yang seharusnya tradisi hubungan ini mesti ditempatkan dalam ruang yang hendak dicita-citakan, yakni pengembangan keilmuan. Padahal, lebih jauh lagi, tradisi keilmuan dalam area kampus merupakan salah satu citra, atau simbol identitas yang mesti dibentuk, dibangun, dan juga dikembangkan.⁴ Bahkan pembentukan tradisi ini, berarti membangun sebuah dialog⁵ yang

¹Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal. 170.

²H.A. Mukti Ali, "Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer", dalam Mukti Ali dkk, [peng.] Burhanuddin Daya, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997, hal. 3.

³Muhammad TWH, *Heroiknya Syuhada Aceh*, Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan R.I, 2002, hal. 5-18.

⁴Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, [terj.] Misbah Zulfa Ellizabet, Zainul Abbas, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 85-88. Leonard Binder, [terj.] Imam Muttaqin, *Islam Liberal; Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 7-10. John L. Esposito [alih bahasa.] A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hal. 219-231.

⁵Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", dalam pengantar Mohtar Mas'oed, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 3-5. H.A. Mukti Ali, "Agama, Moralitas...dalam Mukti Ali dkk, [peng.] Burhanuddin Daya, *Agama dalam...*, hal. 7-8. S. Sudiarja, "Tanpa Kemampuan Komunikatif Masyarakat Hancur", dalam jurnal *Basis*, "Demokrasi Deliberatif untuk Indonesia", No 11-12, Tahun

menghasilkan kesepahaman atau juga peningkatan pemahaman-diri secara komunal; "dengan sedikit menyandera kepentingan pribadi untuk terpenuhi hak-hak yang lebih didaya-gunakan, baik secara akademik maupun secara keilmuan".

Kejadian seperti ini, entah positif atau negatif, sengaja atau tidak sengaja, manfaat atau mudharat, adalah sebuah refleksi kecil yang lahir dalam ruang pendidikan di kampus. Begitu pula dengan tradisi kebebasan akademik dan kepastian "harapan" bagi yang berada dalam dunia ini, entah ilmunya, orang-nya, sistemnya, dan perangkat disiplin lainnya juga seakan-akan, dengan mengutip pernyataan Ignas Kleden, Guru Besar Antropologi, menarik disimak dalam artikel pendek ini: "Mengapa gerangan beberapa hal yang harus ditolak secara intelektual, ternyata masih diterima secara budaya dan sebaliknya, mengapa pula ada hal-hal yang harus dan memang dapat diterima secara intelektual, tetapi belum atau bahkan tidak diterima secara budaya—*yang dalam hal ini penulis maksudkan dalam rapor sosial atau intelektual kah peranan kampus kita*.⁶ Ada dua asumsi besar yang perlu diperhatikan mengenai komentar Ignas Kleden di atas berhubungan dengan artikel ini.⁷ Yang *pertama*, dalam dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi, apakah hubungan sosial yang harus diutamakan atau hubungan intelektual yang harus lebih ditekankan? Kemudian yang *kedua*, bagaimana hubungan ini dibangun jika tanpa melewati renungan kebebasan akademik? Untuk mengarai kembali ke dua asumsi ini, penulis mencoba mengambil tempat yang dianggap relevan menurut iklim dan dinamika Perguruan Tinggi IAIN Ar-Raniry saat ini. Pun demikian, kesesuaian ini berdasarkan tesa awal yang penulis peroleh mengenai "Tradisi Pengembangan Keilmuan di IAIN Ar-Raniry". Sehingga penulis sedikit berani menempatkan tulisan ini dalam pendekatan "fungsionalisme", dan juga erat kaitanya dengan ilmu sosiologi.⁸ Karena dalam benak penulis, pendekatan ini sekurang-

Ke-53, Nopember-Desember, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2004, hal. 41-47.

⁶Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987, hal. xiv.

⁷*Ibid*, hal. xv.

⁸George Ritzer & Douglas J. Goodman, [terj.,] Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 5.

kurangnya mampu memberi *in-put* atas fenomena peran hubungan kampus dalam meningkatkan mutu keilmuan di IAIN Ar-Raniry. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini akan memberi semacam "renungan kecil" dalam menggambarkan gejala yang selama ini terjadi atas tradisi pengembangan keilmuan di IAIN Ar-Raniry.

Hubungan Sosial atau Intelektual

Upaya membangun ke dua misi ini tentu bertalian erat dengan kemampuan membangun sebuah peradaban manusia. Hampir tidak mungkin dipercaya, bahwa persoalan-persoalan sosial-moral dan intelektual-moral dapat dirubah begitu saja untuk menjadi persoalan-persoalan yang bersifat teknologis. Dua-duanya saling membutuhkan—terlepas adanya titik-titik persamaan maupun perbedaan. Dan biasanya, persamaan maupun perbedaan itu lahir berdasarkan lingkungannya.

Dalam sebuah tradisi,⁹ maka batas suatu organisme dan lingkungan-nya relatif jelas. Kelompok sosial dan lingkungan sosialnya, kelompok budaya dan lingkungan budayanya. Kelompok dosen dan lingkungan dosennya. Kelompok mahasiswa dan lingkungan mahasiswanya. Begitu seterusnya. Tapi persoalan ini akan nampak berlainan ketika adanya relasi yang hendak "dipasung" dalam wilayah yang berbeda, dan atau bukan pada tempatnya. Seperti mahasiswa dimasukkan dalam lingkungan dosen. Budaya dimasukkan dalam lingkungan sosial. Begitu seterusnya. Karenanya, fenomena seperti ini sama sekali tidak pernah netral dengan keadaan lingkungannya. Juga dianggap sebagai bentuk utopia, kerana kondisi harmoni sosial yang sempurna hanya sekedar suatu permainan dalam khayalan yang kosong. Dan lebih dari itu, fenomena seperti ini justru menjadi faktor konstitutif dari lingkungannya. Padahal dalam lingkungan tradisi manusia—yang dalam hal ini adalah "kampus" merupakan lingkungan yang dibuat sendiri dan dirancang menurut ukuran sosial, tanpa ada unsur deterensi apalagi mengandung nilai representasi politis. Sehingga sangat tidak beralasan, jika mahasiswa begitu sulit diterima

⁹Azyumardi Azra, *Pendidikan...*, hal. 26-27. Lalu lihat juga Faruk, "Kritik Terbuka: Sebuah Imperatif Budaya", dalam pengantar Mohtar Mas'ood, *Kritik...* hal. 31-36.

secara intelektual dalam komunitas sosialnya. Hal ini tentu saja berlaku sepenuhnya penilaian yang objektif.

Ada 3 mekanisme yang perlu penulis turunkan untuk mengurai fenomena di atas dalam artikel ini. Yang *pertama*, materi yang kurang relevan dan tidak "menekan" secara konseptual dan aktualisasi. *Kedua*, pendekatan kurikulum yang tidak bervariasi, homogen, kurang cocok dengan kebutuhan; padahal yang dibutuhkan adalah pendekatan yang bersifat interdisipliner. Dan yang *ketiga*, tenaga pengajar yang kurang mendalami konsep atau aspek sosial mahasiswa yang beragam, seperti lingkungan akademik mereka, juga termasuk literatur yang kurang memadai. Kendati ketiga skema interpretasi ini tidak selamanya menetap, dan tergantung bagaimana kapasitas kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam menerima layanan informasi mengenai pengetahuan.

Sementara persoalan metodologi dalam perencanaan, pengajaran, dan penelitian tentang keislaman juga masih sangat kurang. Dalam banyak kasus, lembaga pendidikan Islam mengalami kekurangan staf pengajar, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara umum, staf pengajar masih memegang paradigma sistem pendidikan Islam kuno. Dengan lain kata, mayoritas mereka (lembaga institusi) cenderung menggunakan pelbagai metodologi pengajaran yang tidak layak untuk memberikan gambaran atau dorongan yang diperlukan berdasarkan bakat dan pemikiran mahasiswa. Selain masalah tersebut, lembaga pendidikan Islam juga ditantang oleh pertumbuhan kecanggihan teknologi. Sehingga kepercayaan "yang dalam" terhadap akal dapat diremehkan melalui tindakan bahasa oral. Mahasiswa sangat tidak peka jika sebagian dosen misalnya, menyampaikan pengajaran dengan menggunakan metodologi-empiris, dan bukan secara praktis. Sekedar mengingatkan, hampir secara keseluruhan, budaya mencatat, membaca, atau mendengar di kalangan mahasiswa begitu rendah. Karenanya menurut Azyumardi Azra, lembaga pendidikan Islam perlu menyesuaikan minat kebutuhan mahasiswa secara akademik, dengan ragam penemuan yang ada di bidang teknologi. Dan yang perlu diperhatikan, sistem lembaga pendidikan Islam yang mesti diperbarui; kurikulum harus ditingkatkan dengan memasukkan topik-topik beragam, berbobot dan menarik.¹⁰

¹⁰Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hal. 28.

Jika hal ini dikembangkan, maka layanan pengetahuan dengan sendirinya meningkat. Bahkan lembaga resmi pun (IAIN) tidak lagi bebas melakukan monopoli atas ragam intelektual mahasiswa. Dengan arti kata, peran lembaga harus mengikuti tradisi hubungan kampus, di mana tuntutan objektivitas sejarah tidak menata mahasiswa menurut sebuah *grand design*, melainkan dibangun berdasarkan *piecemeal*, dengan menangani masalah-masalah yang muncul; langkah kecil demi langkah kecil, dan bukan menaruh perhatian langsung pada persoalan yang besar. Di samping itu, mereka (mahasiswa) memilih IAIN sebagai kampus mereka lebih kepada pendidikan agama. Bahkan dianggap sebagai usaha untuk mengembangkan fitrah keberagamaan (sosial), menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Lebih dari itu, berarti mereka masih mau menjaga warisan agama-nya dan simbol dari legalitas-identitas mereka. Proses seperti ini tentu saja sangat mengembirakan. Terlebih lagi gagasan-gagasan tersebut merupakan rangsangan yang tak terkendali (begitu murni) dalam pribadi-pribadi mahasiswa; sadar akan diri-nya dalam menghadapi dilema perubahan global yang tak terkendali-kan, dan kekuatan yang tak dapat dicegah atas begitu banyak peningkatan kebutuhan manusia yang tumbuh dan berkembang oleh kekritisian rasional. Hal ini juga telah dijawab secara tuntas oleh Juergen Habermas dengan memperkenalkan epistemologi baru tentang hubungan antara "pengetahuan dan kepentingan".¹¹

Ada dua tesis besar yang ditujukannya. *Pertama*, setiap jenis pengetahuan (dan juga ilmu pengetahuan) telah lahir dari dorongan jenis kepentingan tertentu. *Kedua*, hubungan dengan jenis kepentingan yang mendorongnya adalah hubungan yang bersifat niscaya.¹² Demikian pula kepentingan teknis telah mendorong kelahiran ilmu-ilmu empiris-positif yang dimaksudkan untuk menunjang proses produksi; kepentingan praktis (yaitu, dorongan untuk hidup dengan benar) telah melahirkan kelompok-kelompok pengetahuan lainnya, seperti humaniora yang menunjang proses komunikasi, sedangkan kepentingan politis telah mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial kritis yang kemudian menunjang proses emansipasi.¹³ Untuk itu, seperti yang telah digambarkan oleh Azyumardi di atas, bahwa lembaga pendidikan

¹¹Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah...*, hal. xvi.

¹²*Ibid*, hal. xvi-xvii.

¹³*Ibid*, hal. xvii.

seperti IAIN tidak perlu khawatir munculnya ragam pengetahuan baru di zaman yang serba canggih. Bila perlu, pengembangannya bisa menjadi daya dobrak menambah nilai jual dari segi kompetisi ilmiah. Apalagi jika menilik kembali perjalanan sejarah IAIN Ar-Raniry, mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi adalah mahasiswa pilihan. Mereka juga berangkat dari keinginan pribadi, dan bukan atas dasar serah-terima antar sekolah atau lembaga sebelumnya. Apalagi pribadi-pribadi mereka adalah pribadi intelektual yang dibawa berdasarkan nilai dan pengetahuan mereka.

Juga demikian halnya, hubungan antara nilai dan pengetahuan dalam ilmu tidak hanya terjadi pada asal usul kelahirannya, melainkan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan komunitas iklim sosial-nya. Sehingga nilai-nilai itu perlu diimplikasikan kembali, dengan cara memasukkan mereka (mahasiswa) ke dalam lingkungan intelektual yang telah tumbuh sebelumnya, atau bila perlu dipublikasikan secara besar-besaran; tanpa meminimalisir peran yang lebih "unggul" sebelumnya. Persoalan nilai dalam ilmu pun cenderung terdiri dari 3 lapisan persoalan yang berbeda. *Pertama*, nilai sebagai basis (pusat) bagi asumsi dan teori ilmu. *Kedua*, implikasi nilai dari penerapan ilmu. Dan yang *ketiga*, penilaian sebagai tindakan ilmiah.¹⁴ Sebagai tolak ukur yang jelas, maka peran kampus memiliki adegium yang kuat membangun tradisi intelektual dalam komunitas sosial agama. Juga bukan sebaliknya. Hanya sekedar membangun sosialisasi dalam bidang agama-umum. Karenanya, gagasan pengembangan ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, lebih kepada membangun tingkat kesadaran serta kebebasan berpikir antara logika perkembangan dengan dinamika perkembangan. Dengan demikian, hubungan intelektual yang terjadi di tingkat kampus akan mempermudah membangun tradisi keilmuan yang selama ini didengungkan.

Pada titik ini kelihatan, bahwa hubungan sosial hanya akan mempertemukan relasi-relasi antar-pribadi, dan kurang berkembang menjadi pertemuan antar-pikiran. Kecenderungan ini harus menjadi alibi, jika hendak membangun tradisi kampus dalam kekuatan akademik yang lebih ilmiah—apalagi dalam menghadapi tantangan global.

¹⁴*Ibid.* Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun Juergen Habermas", dalam *jurnal Basis*, "Demokrasi Deliberatif...", hal. 6-7.

Pertemuan antar-pikiran (dunia ide) selalu memunculkan gagasan-gagasan baru, sehingga dengan sendirinya tindakan-tindakan lama (produk lama) akan berhenti disebabkan tuntutan perubahan. Lebih dari itu, dunia ide mempunyai dinamik dan kekuatan sendiri daripada sekedar dunia sosial. Untuk itu, solusi yang tepat dalam menata perubahan di bidang keilmuan [IAIN] adalah menangkap semua informasi yang ditawarkan oleh "budaya global", yang kemudian diterapkan dalam pelbagai ketrampilan metodologi. Barangkali hal ini akan lebih relevan dalam meningkatkan keilmuan-akademik, tanpa harus merombak ulang tradisi yang sudah ada sebelumnya.

Renungan Kebebasan Akademik

Seperti yang telah dijelaskan di muka, bahwa mahasiswa hanya menjadikan IAIN Ar-Raniry sebagai pilihan. Namun masalahnya, perhatian lembaga pada tingkat kebebasan akademik masih bisa dipertanyakan. Padahal kebebasan akademik merupakan sesuatu yang sangat fundamental di dalam perguruan tinggi. Juga sebagai upaya lahirnya pikiran-pikiran ilmiah dari kaum intelektual kampus yang penuh kreatif dan produktif dengan gagasan-gagasan barunya.¹⁵ Dengan kebebasan akademik pula, intelektual kampus memiliki kebebasan untuk melaksanakan fungsinya sebagai akademisi, atau juga mengimplementasikan tugas-tugas universitas tanpa ada intervensi dari pihak lembaga. Sebagai contoh, di berbagai kampus di Indonesia, kebebasan akademik telah menjadi genre yang besar dalam memompa semangat idealisme mahasiswa. Sehingga praktisnya, kebebasan menempatkan mereka dalam ruang yang bebas nilai dan tradisi diskusi. Sebaliknya di tempat kita—kampus IAIN masih terkesan itu dipaksakan. Bahkan yang sering dijumpai adalah tradisi-tradisi yang dibentuk melalui dunia ngobrol.

Namun kebebasan akademik seperti itu tidak selamanya berjalan normal dalam sebuah sistem yang telah dikontrol oleh media institusi. Bahkan fungsi kampus tidak lagi disesuaikan dengan civitas akademik-nya. Sehingga, konsep-konsep seperti aktor (dosen), situasi (waktu belajar), dan orientasi (tujuan dan manfaat) tidak lebih sebagai

¹⁵Isaiah Berlin, [peng.,] Ahmad Sahal, *Four Essays on Liberty: Empat Esai Kebebasan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hal. 232-246.

simbol tindakan saja. Konsekuensi ini yang akhirnya mengharuskan kebebasan akademik begitu tertutup, baik secara budaya, sosial, maupun kepribadian. Keadaan tersebut, dalam kenyataannya belum banyak berubah pada masa sekarang di lingkungan IAIN Ar-Raniry. Tapi ironisnya, sementara perluasan atau minat dalam meningkatkan mutu keilmuan terus dipicu sampai batas tak terhingga. Bahkan para pemimpin formal atau tokoh kuat perorangan justru memperkuat proses klerikalisasi, di mana setiap mahasiswa diresmikan dengan ragam atribut dan gelar akademis, dan kemudian berpartisipasi secara luas dalam birokrasi, dengan tanpa memperhatikan kesejahteraan mahasiswa yang lebih produktif, entah secara akademik maupun profesionalitas.

Karenanya, kebebasan akademik terutama yang berhubungan dengan kritik sosial yang mengarah pada pembentukan intelektual mengalami persoalan. Padahal pembentukan intelektual sendiri adalah salah satu bentuk tantangan dalam menghadapi era globalisasi yang penuh kompetisi. Sehingga pembentukan itu perlu diwujudkan secara terus-menerus. Mutu keilmuan dalam sebuah tradisi kampus bagaikan matapisau yang terus diasah, atau bila perlu diganti fungsinya dengan "alat" yang lebih tajam sebagai wujud sarana produksi. Dengan kata lain, kampus cenderung dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang "halus" (cenderung memanjakan mahasiswa dengan ragam kesulitan yang dihadapi), yang seharusnya diganti fungsinya dengan alat yang lebih "kasar" (buat mahasiswa untuk lebih kreatif dalam berpikir).¹⁶

Ada beberapa titik soal yang perlu disepakati bersama dalam membangun iklim kebebasan dalam mengoak peningkatan mutu intelektual akademik kampus, di antaranya adalah: *pertama*, apakah kebebasan itu bersifat subyektif atau obyektif, individual atau kolektif, biografis, atau historis. *Kedua*, apakah kebebasan itu bisa memunculkan persamaan pandangan dalam kampus. Dan yang *ketiga*, apakah kebebasan akan memberi manfaat bagi masing-masing pihak yang berada di kampus.

Ketiga permasalahan ini terjalin dalam satu sistem transitivitas logika. Tidak memerlukan upaya-upaya pembenaran atau kesalahan,

¹⁶Michel Foucault, alih bahasa Arief, *Pengetahuan dan Metode; Karya-karya Penting Foucault*, Yogyakarta: Jalasutra, 2002, hal. 124-130. Isaiiah Berlin, [peng.,] Ahmad Sahal, *Four Essays...*, hal. 227-231

melainkan hanya dilihat dari segi fungsi dan kegunaannya. Jika kebebasan akademik itu mengandung sifat solipistik dan egoistik, maka boleh jadi tingkat intelektual mahasiswa dibangun hanya dalam bentuk euforia semata. Begitu juga dengan kebebasan yang bersifat individual, subyektif, dan biografis, maka segala upaya dari luar [yang se-institusi dengannya] untuk mencampuri—kalau tidak dikata hanya ikut memberi pandangan saja, tentu proses intelektual mahasiswa justru akan menggantikan otensitas (kemurnian orientasi) dengan alteritas (kepalsuan identitas). Dan yang terakhir, jika kebebasan itu bersifat obyektif, kolektif, dan historis, maka pembentukan intelektual mahasiswa akan mudah dimasuki dengan ragam wacana, entah dari segi diskusi ilmiah, penelitian ilmiah, seminari ilmiah, dan atau yang sejenis dengannya. Sebab bagaimana pun, kebebasan akademik yang akan dibentuk harus berdasarkan cita-cita awal, yakni mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan agama sekaligus membentuk mahasiswa yang kompeten menurut masing-masing konsentrasi. Sehingga kebebasan seperti ini juga membantu mahasiswa mengenal diri-nya dan lingkungan. Terlebih lagi kebebasan akademik tidak menafikan peran lembaga dalam membangun tindakan-tindakan yang positif bagi mahasiswa. Dengan kata lain, orientasi yang hendak dicapai dari segi peningkatan keilmuan hanya menunggu moment yang tepat, dan mahasiswa pada gilirannya begitu mudah menerima "tawaran" akademik dengan segala civitas yang berada di dalamnya (silabus, staf pengajar, birokrasi, dan yang sejenis dengannya) dari pemegang otoritas dalam lembaga institusi kampus. Sebagai contoh, dan jika ini diterima dengan obyektif, kebebasan kampus seyogyanya menuntut mahasiswa ikut ambil peran dalam segala aktivitas akademik dengan berdasarkan kemampuan akademik-nya. Atau yang lebih sederhana, memberi kesempatan melakukan kritik secara akademis terhadap suatu gagasan atau hasil penelitian—dan kemudian disikapi secara obyektif tanpa melahirkan anggapan secara pribadi. Tetapi bukan sebaliknya. Sikap kritis biasanya, seakan-akan identik dengan antipati atau bahkan menjadi permusuhan pribadi. Sehingga terkesan, bahwa penerimaan terhadap suatu gagasan lebih ditentukan oleh siapa yang mengucap-nya, dan bukan oleh apa yang dikatakan-nya.

Jika demikian halnya, maka dorongan dalam pendidikan—terlebih lagi dalam peningkatan mutu ilmu akan cenderung meningkatkan sensitivitas yang kurang serasi antara mahasiswa dan

dosen. Begitu seterusnya. Yang kecil lebih didominasi oleh yang besar. Padahal proses kognitif (pengetahuan) hanya dilihat sebagai proses yang paralel. Yang berarti semua rangsangan pengetahuan diperoleh secara bersamaan. Dengan arti kata, bukannya pendapat atau penjelasan seseorang dosen yang mempunyai gelar akademik lebih didengar, daripada pendapat atau penjelasan seseorang mahasiswa yang lebih baik argumennya, kendati kebetulan tidak menyangkut suatu gelar akademis.¹⁷

Untuk itu, tidak ada aturan-aturan tertentu, entah itu dosen maupun mahasiswa dalam mewujudkan tindakannya mengenai proses pembentukan intelektual, selain mempertemukan "antar-pikiran" dengan mencari ragam informasi yang sebanyak-banyaknya melalui metodologi dan kebebasan-nya. Karenanya, dalam sebuah model *connnectionist*¹⁸, unsur-unsur pengetahuan akan menjadi aktif apabila mengikuti kombinasi-kombinasi tertentu, seperti memberikan kebebasan pola pikir bagi mahasiswa, entah berdasarkan pemikiran sang tokoh, menyediakan bacaan tentang teori-teori gerakan, menyediakan arena debat se-mahasiswa, dan atau kegiatan ekstra lainnya menurut minat dan bakat-nya. Praktek ini hanya untuk menumbuhkan rangsangan-rangsangan yang akan diterima oleh mahasiswa. Semakin sering rangsangan itu diterima, maka semakin mantap kombinasi unsur-unsur [pengetahuan: agama maupun umum] tadi dalam diri mahasiswa.¹⁹

Sebagai indikasinya, kebebasan akademik yang diperoleh oleh mahasiswa, pada umumnya melalui proses belajar yang bersifat informal, atau melalui pengamatan sehari-hari, dan bukan dari sebuah instruksi formal [silabus dan perangkat lainnya] yang lazim disediakan oleh lembaga institusi. Namun begitu, instruksi formal hanya sebagai simbol atau alat dalam membantu mahasiswa menghadapi suatu situasi

¹⁷Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI-Press, 1987, hal. 31-32.

¹⁸Ezra M. Choesin, "Connectionism: Alternatif dalam Memahami Dinamika Pengetahuan Lokal dalam Globalisasi", dalam *jurnal "Antropologi Indonesia"*, Tahun XXVI. No. 69, September-Desember, 2002.

¹⁹*Ibid*, hal. 3.

atau menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya, tanpa harus merubah kembali instruksi formal tersebut.

Penutup

Dalam tulisan ini, penulis telah mencoba menunjukkan suatu bentuk yang selama ini dirasa kurang dari segi peningkatan mutu keilmuan. Dalam pandangan penulis apa yang selama ini telah digunakan, entah silabus-materi maupun metodologi dalam tanda kutip bukanlah sesuatu yang nihil. Lembaga [IAIN Ar-Raniry] telah memberikan kapasitas terbaiknya berdasarkan pengamatan kemampuan mahasiswa. Sebab bagaimana pun, kecenderungan pada perubahan silabus-materi dengan tawaran metodologi yang kurang seimbang justru akan memberikan pelayanan peningkatan mutu keilmuan yang kurang seimbang pula.

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah, pada pembentukan skema-skema interpretasi dan tindakan dalam menghadapi suatu masalah. Dengan arti kata, kecenderungan mahasiswa dengan dunia sosial (budaya global), tidak mengharuskan lembaga memilih sebuah "resep" dalam bertindak membangun mutu keilmuan, melainkan menerima dan memproses semua informasi secara bersamaan. Seperti yang telah dijelaskan H.A Mukti Ali di atas, "kita membutuhkan pembaruan dan kearifan fundamental untuk merespon-nya dengan sikap yang sesuai dan tepat", adalah sesuatu yang membangun. Karenanya, lembaga mesti memiliki sudut pandang yang jelas: membangun mutu keilmuan hanya sebagai ajang pertemuan antar-pribadi atau sebaliknya, sebagai ajang pertemuan antar-pikiran. Sebab, dari kedua ajang ini akan mengundang pertanyaan baru dari segi peningkatan mutu keilmuan, dan ini telah penulis jelaskan di atas. Sehingga patron keilmuan harus menjadi "tenaga diesel" dan selalu dihidupkan dalam lingkungan mahasiswa yang tanpa batas. Ini tentu saja akan menambah penilaian yang obyektif, di mana setiap mahasiswa dihadapkan pada lingkungan (fisik dan sosial) yang sama, pun akan cenderung membentuk skema-skema serupa (karena menghadapi masalah yang serupa), yakni peningkatan keilmuan.

Jika hal ini dicermati secara bijak, maka lembaga perlu memperhatikan kembali kebutuhan mahasiswa, tanpa perlu menyalahkan silabus-materi. Ada yang lebih dirasa penting oleh

mahasiswa, seperti pembentukan intelektual-nya, juga kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. Korelasi kedua ini [intelektual dan kebebasan] adalah tuntutan epistemologis sebelum mereka berangkat lebih jauh lagi dalam menerima pengetahuan. Karenanya, menurut penulis, jika kedua relasi ini dipisahkan—apalagi dikesampingkan dari segi epistemologi (benar-salah buah pikiran mahasiswa), maka peningkatan mutu ilmu bagi mahasiswa akan terasa terabaikan. Pun kesatuan secara organis juga kesinambungan tradisi keislaman di lembaga IAIN Ar-Raniry akan menjadi simbol negosiasi semata.

Daftar Kepustakaan

- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bassam Tibi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, [terj.] Misbah Zulfa Ellizabet, Zainul Abbas, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999
- Ezra M. Choesin, "Connectionism: Alternatif dalam Memahami Dinamika Pengetahuan Lokal dalam Globalisasi", dalam jurnal "Antropologi Indonesia", Tahun XXVI. No. 69, September-Desember, 2002
- Faruk, "Kritik Terbuka: Sebuah Imperatif Budaya", dalam pengantar Mohtar Mas'oed, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Franz Magnis-Suseno, "75 Tahun Juergen Habermas", dalam jurnal Basis, "Demokrasi Deliberatif untuk Indonesia", No 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2004
- Isaiah Berlin, [peng.], Ahmad Sahal, *Four Essays on Liberty: Empat Esai Kebebasan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, [terj.] Alimandan, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, Jakarta: Kencana, 2006
- H.A. Mukti Ali, "Agama, Moralitas dan Perkembangan Kontemporer", dalam Mukti Ali dkk, [peng.], Burhanuddin Daya, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997
- Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta: LP3ES, 1987
-

- John L. Esposito, [alih bahasa.,] A. Rahman Zainuddin, *Identitas Islam pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI-Press, 1987
- Leonard Binder, [terj.,] Imam Muttaqin, *Islam Liberal; Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Michel Foucault, [alih bahasa.,] Arief, *Pengetahuan dan Metode; Karya-karya Penting Foucault*, Yogyakarta: Jalasutra, 2002
- Muhammad TWH, *Heroiknya Syuhada Aceh*, Medan: Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan R.I, 2002
- S. Sudiarja, "Tanpa Kemampuan Komunikatif Masyarakat Hancur", dalam jurnal *Basis*, "Demokrasi Deliberatif untuk Indonesia", No 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember, Yogyakarta: Yayasan BP Basis, 2004
- Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", dalam pengantar Mohtar mas'oed, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
-